

Dari Pesantren ke Pergerakan Modern: Jejak Sejarah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Arisya Rajagukguk¹ Mawaddah² Rosmaida Sinaga³ Risky Simanulang⁴ Fandi Saputra Nduru⁵

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: arisyarajagukguk9@gmail.com¹ mawaddahirc@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini menelusuri jejak historis dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang lahir dari rahim pesantren namun berkembang menjadi pilar penting dalam modernisasi dan pergerakan sosial-keagamaan di Indonesia. Muhammadiyah dan NU muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial keagamaan umat Islam yang saat itu berada dalam tekanan penjajahan, kebodohan struktural, serta dekadensi moral yang disebabkan oleh lemahnya pendidikan dan menyebarnya praktik keagamaan yang menyimpang. Dengan menggunakan pendekatan historis-kualitatif, tulisan ini membandingkan latar belakang pendirian, visi keagamaan, bentuk pergerakan, serta kontribusi keduanya dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Meski berasal dari basis keagamaan yang serupa, Muhammadiyah berkembang dengan pendekatan rasional dan modernis, sedangkan NU meneguhkan tradisi keagamaan lokal secara kontekstual. Keduanya saling melengkapi dalam membangun masyarakat Islam yang moderat, inklusif, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pesantren, Modernisasi Islam, Sejarah Organisasi, Gerakan Sosial-Keagamaan

Abstract

This article explores the historical trajectory of Indonesia's two largest Islamic organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), both of which originated from the pesantren (Islamic boarding school) tradition but evolved into crucial pillars of modernization and socio-religious movements in Indonesia. Muhammadiyah and NU emerged as responses to the socio-religious conditions of Indonesian Muslims during colonial oppression, structural ignorance, and moral decline caused by weak education and widespread deviant religious practices. Using a historical-qualitative approach, this study compares the background of their establishment, theological visions, forms of movement, and their contributions to education, social welfare, and politics. Although both organizations share similar traditional Islamic roots, Muhammadiyah has developed a rational-modernist approach, while NU emphasizes the contextual preservation of local religious traditions. Together, they complement each other in fostering a moderate, inclusive Islamic society that plays an active role in national development.

Keywords: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pesantren, Islamic Modernization, Organizational History, Socio-Religious Movement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemunculan gerakan Islam di awal abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-politik masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam tekanan penjajahan. Saat itu, umat Islam menghadapi berbagai tantangan berat seperti kebodohan akibat keterbatasan akses pendidikan, kemiskinan yang merajalela, serta krisis moral akibat lemahnya pemahaman keislaman. Dalam situasi seperti ini, muncul kebutuhan mendesak akan pembaruan dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, lahirlah dua organisasi Islam besar di Indonesia yang hingga kini masih sangat berpengaruh, yaitu

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya berasal dari tradisi pesantren, namun memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam menyikapi perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap praktik keagamaan yang bercampur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dengan semangat pembaruan (tajdid), Muhammadiyah mendorong umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, serta mengembangkan pendidikan modern dan pelayanan sosial sebagai sarana dakwah.

Sebaliknya, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren lainnya. NU lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme serta sebagai upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi yang saat itu dianggap berpotensi menggerus tradisi keagamaan lokal. NU mengusung Islam yang moderat, ramah terhadap budaya lokal, dan mendorong penguatan keilmuan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Muhammadiyah dan NU menjadi bukti nyata bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk melahirkan gerakan sosial-keagamaan yang kokoh dan berpengaruh. Kedua organisasi ini menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari akar yang sama, yaitu pesantren, mereka mampu berkembang dengan pendekatan yang berbeda namun tetap bertujuan untuk memperkuat umat. Muhammadiyah tampil dengan wajah modern, rasional, dan institusional, sedangkan NU menjaga kesinambungan tradisi, budaya, dan nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Tulisan ini akan membahas lebih jauh perjalanan sejarah keduanya, menggambarkan dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi arah gerakan mereka, serta mengeksplorasi berbagai kontribusi penting Muhammadiyah dan NU dalam membangun kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Sejarah dengan pendekatan heuristik. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen resmi organisasi, jurnal ilmiah, dan karya-karya akademik lainnya. Analisis dilakukan dengan menelusuri kronologi sejarah, dinamika ideologi, serta bentuk pergerakan sosial keagamaan Muhammadiyah dan NU. Referensi utama berasal dari jurnal-jurnal seperti *Journal of Indonesian History* (2023), Walisongo (2016), *Al-Insiyiroh* (2019), dan *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* (2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Organisasi Muhamadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang telah berdiri sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya. Secara bahasa, istilah "Muhammadiyah" berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya adalah "Muhammad", nama Nabi Muhammad SAW yang berarti "yang terpuji", kemudian ditambah dengan akhiran *ya' nisbah* yang menunjukkan hubungan atau afiliasi, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai "pengikut Nabi Muhammad SAW". Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Muhammadiyah menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar utama ajarannya (Muhammad, 2014). KH. Ahmad Dahlan sendiri merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari Wali Songo yang dikenal sebagai tokoh awal penyebaran Islam di Jawa. Pada tahun 1909, KH. Ahmad Dahlan sempat bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pendidikan agama kepada para anggota organisasi tersebut, yang sebagian besar bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik pemerintah. Melalui langkah ini, ia berharap bisa membawa ajaran agama Islam masuk ke dalam dunia pendidikan formal di masa itu. (Siri, 2022)

Pola Pergerakan Muhammadiyah

Pola pergerakan Muhammadiyah sangat sistematis dan terstruktur, didasari oleh semangat amar ma'ruf nahi munkar. Sejak awal pendiriannya, Muhammadiyah telah menetapkan fokus pada reformasi pemikiran dan tindakan sosial keagamaan melalui pendekatan rasional dan modern. KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama untuk membentuk umat yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mendirikan jaringan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) menjadi instrumen utama dalam menjalankan peran-peran strategis organisasi ini. AUM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, termasuk sekolah, rumah sakit, panti asuhan, koperasi, dan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data dari Republika tahun 2021, Muhammadiyah memiliki lebih dari 10.000 unit amal usaha yang aktif di seluruh Indonesia. AUM tidak hanya menjadi pusat pelayanan publik tetapi juga wadah kaderisasi dan penguatan dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berhasil membangun sistem sosial keagamaan yang mandiri dan profesional. (Weli, Mudafri, 2024) Karakter Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pembaruan) terlihat jelas dalam sikap kritisnya terhadap praktik-praktik keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan hadis shahih. Muhammadiyah secara konsisten menolak takhayul, bid'ah, dan khurafat (TBC), serta mendorong pemahaman Islam yang murni dan rasional. Upaya tajdid ini tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial dan budaya. Dengan semangat tajdid, Muhammadiyah terus mendorong umat Islam untuk menjadi pelaku aktif perubahan sosial yang berbasis pada nilai-nilai keislaman yang autentik dan kontekstual. (Weli, Fathiyah, 2024)

Muhammadiyah dan Pembaruan Sosial

Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah keagamaan, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata. Salah satu bentuk nyata dari pembaruan sosial yang dilakukan Muhammadiyah adalah perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Melalui organisasi otonom Aisyiyah yang didirikan sejak 1917, Muhammadiyah membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Aisyiyah mendirikan sekolah khusus perempuan, rumah sakit ibu dan anak, hingga pelatihan keterampilan, sehingga kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah juga mendorong umat untuk saling membantu melalui program-program berbasis filantropi Islam, seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (Lazismu), Muhammadiyah menyalurkan dana umat secara terorganisir kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan langsung, pendidikan, modal usaha, maupun pelayanan kesehatan. Dengan cara ini, Muhammadiyah berhasil menghubungkan nilai-nilai agama dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Aisyah, 2024) Pendekatan Muhammadiyah dalam pembaruan sosial bersifat inklusif dan adaptif. Organisasi ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan sebagai bagian dari misi dakwah. Muhammadiyah juga aktif dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, dan ketimpangan sosial, dengan menawarkan pemahaman Islam yang ramah, terbuka, dan toleran. Melalui jaringan lembaga sosial dan amal usaha yang tersebar di berbagai daerah, Muhammadiyah terus membuktikan diri sebagai pelopor gerakan sosial Islam yang modern dan membumi di tengah masyarakat Indonesia. (Aisyah, 2024)

Muhammadiyah dan Respon terhadap Modernitas

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah tidak memusuhi modernitas, tetapi justru menjadikannya sebagai bagian dari strategi dakwah. KH Ahmad Dahlan mendorong umat Islam untuk tidak menutup diri dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Muhammadiyah, modernitas bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai keislaman melalui pendekatan yang rasional dan kontekstual. Salah satu bentuk adaptasi Muhammadiyah terhadap modernitas terlihat dari perhatiannya terhadap pendidikan dan media. Muhammadiyah mendirikan berbagai institusi pendidikan formal yang menggabungkan kurikulum agama dan ilmu umum, dari TK hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, Muhammadiyah aktif memanfaatkan media massa seperti majalah *Suara Muhammadiyah*, yang telah terbit sejak 1915, sebagai sarana dakwah dan penyebaran informasi Islam yang mencerahkan dan membangun. (Mursyid, 2023) Tak hanya itu, Muhammadiyah juga aktif dalam layanan sosial modern seperti rumah sakit, klinik, dan layanan bencana. Rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana prinsip Islam bisa dijalankan dengan profesionalisme modern. Organisasi ini juga menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan program-programnya, termasuk dalam pengumpulan zakat dan pengelolaan amal usaha. Dengan demikian, Muhammadiyah telah membuktikan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan modernitas tanpa kehilangan jati diri keislamannya, bahkan menjadikannya alat untuk membangun peradaban yang lebih maju, adil, dan beradab. (Aisyah, 2024)

Muhammadiyah dalam Konteks Kebangsaan

Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi ini bukan hanya aktif dalam bidang keagamaan dan sosial, tetapi juga dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh penting Muhammadiyah seperti KH. Mas Mansyur tergabung dalam "Empat Serangkai" bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara dalam Gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada masa penjajahan Jepang. Bahkan, Jenderal Besar Sudirman, yang merupakan alumni pendidikan Muhammadiyah, menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan sosok pemimpin militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah tidak tinggal diam. Organisasi ini terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa, terutama dalam membangun karakter warga negara yang religius, toleran, dan cinta tanah air. Muhammadiyah aktif mendorong kesadaran politik yang sehat di masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan penguatan nilai-nilai demokrasi. Tanpa terjun langsung dalam partai politik, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kekuatan moral dan sosial yang menjaga arah pembangunan bangsa agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keislaman. (Weli, Fathiyah, 2024) Peran Muhammadiyah dalam membangun civil society juga terlihat dari upayanya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis umat. Organisasi ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan keterlibatan warga dalam menyelesaikan persoalan bangsa secara kolektif. Muhammadiyah tidak hanya menjadi simbol gerakan Islam yang murni, tetapi juga menjadi kekuatan kultural yang mengakar di masyarakat. Konsep Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keislaman dapat menjadi sumber inspirasi untuk mewujudkan bangsa yang adil, damai, dan Sejahtera. (Aisyah, 2024)

Sejarah Organisasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dan para ulama pesantren lainnya sebagai bentuk respons terhadap munculnya gerakan pembaruan Islam yang dianggap terlalu keras dan tidak menghargai tradisi keagamaan lokal. Gerakan pembaruan pada masa itu seringkali mengkritik praktik-praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti tahlilan, maulidan, ziarah kubur, dan amalan tasawuf, yang sebenarnya telah mengakar kuat dalam budaya Islam Nusantara. NU melihat bahwa tradisi tersebut tidak boleh dihapus begitu saja karena merupakan bagian dari warisan Islam yang telah menyatu dengan kehidupan umat. Kelahiran NU juga tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran para ulama terhadap ancaman kolonialisme yang tidak hanya menjajah secara fisik, tetapi juga berusaha meminggirkan peran ulama dan peradaban Islam. Di tengah tekanan politik dan sosial yang berat, NU hadir untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu paham keagamaan yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, serta mengikuti mazhab-mazhab fiqh yang mapan seperti Syafi'i. NU juga menekankan pentingnya tasawuf yang moderat, sebagai penyeimbang spiritual dalam kehidupan masyarakat. (Indra et al., 2023) Sejak awal berdirinya, NU berperan sebagai pelanjut dari jaringan pesantren tradisional yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pendidikan karakter, budaya, dan kebangsaan. Melalui pesantren-pesantren inilah, NU menjaga kesinambungan keilmuan Islam klasik, seperti kajian kitab kuning, yang menjadi sumber ilmu para ulama Nusantara. Dengan pendekatan yang merangkul budaya lokal dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang moderat, NU berhasil menjaga keseimbangan antara agama dan tradisi, serta memberikan warna khas bagi wajah Islam di Indonesia. (Farid, 2016)

NU dan Resolusi Jihad

Nahdlatul Ulama (NU) memberikan kontribusi besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya melalui peristiwa penting yang dikenal dengan "Resolusi Jihad". Pada tanggal 22 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy'ari bersama para ulama NU mengeluarkan fatwa atau seruan yang menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya adalah fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu Muslim). Seruan ini muncul sebagai respon atas ancaman pasukan Sekutu dan Belanda (NICA) yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan. Resolusi Jihad ini tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi semangat nasionalisme yang luar biasa. Fatwa tersebut menyulut keberanian rakyat untuk angkat senjata, terutama di Surabaya, yang kemudian menjadi pusat perlawanan dalam peristiwa heroik 10 November 1945. Banyak santri, kiai, dan laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah dan Sabilillah yang digerakkan oleh NU terlibat langsung dalam medan tempur. Perlawanan ini tidak hanya membuktikan bahwa agama dan cinta tanah air bisa berjalan beriringan, tetapi juga menjadikan NU sebagai kekuatan yang memperkuat semangat juang rakyat dengan nilai-nilai Islam. Peristiwa Resolusi Jihad ini memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk karakter bangsa. NU berhasil memadukan nilai keagamaan dan semangat kebangsaan dalam satu tarikan nafas perjuangan. Nilai-nilai seperti keberanian, solidaritas, dan keteguhan iman menjadi fondasi ketahanan bangsa yang berakar kuat di tengah masyarakat. Hingga kini, tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar para ulama dan santri, khususnya dari NU, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat jihad yang bermartabat dan bermakna. (Indra et al., 2023)

NU dalam Pendidikan dan Sosial

Nahdlatul Ulama (NU) sejak awal berdirinya telah menjadikan pesantren sebagai pusat kekuatan utama dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pesantren-pesantren NU tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi tempat bagi jutaan santri untuk menimba ilmu agama Islam, khususnya kajian kitab kuning (turats), serta nilai-nilai akhlak dan kebangsaan. Namun, peran pesantren NU tidak berhenti pada aspek pendidikan agama semata. Pesantren juga menjadi pusat kegiatan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat. Untuk memperluas perannya dalam masyarakat, NU membentuk berbagai lembaga otonom yang memiliki fungsi kaderisasi dan advokasi. Misalnya, Muslimat NU dan Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang aktif dalam pemberdayaan keluarga, pendidikan anak-anak, serta kesehatan masyarakat. Di kalangan muda, NU memiliki IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang menjadi wadah pembinaan generasi muda NU dalam hal kepemimpinan, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Sementara itu, kalangan profesional NU difasilitasi oleh ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) untuk berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan kebijakan publik. (Farih, 2016) NU juga tidak tertutup terhadap isu-isu global. Organisasi ini aktif dalam berbagai forum internasional untuk menyuarakan Islam yang damai, ramah, dan toleran. Melalui konsep Islam rahmatan lil alamin, NU mempromosikan nilai-nilai perdamaian dunia, dialog antaragama, dan penolakan terhadap ekstremisme. Keterlibatan NU di panggung internasional, seperti dalam forum antaragama di Eropa dan Timur Tengah, menunjukkan bahwa Islam ala pesantren bukanlah Islam yang eksklusif, tetapi justru sangat relevan dalam menjawab tantangan global. Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi penjaga tradisi keagamaan, tetapi juga aktor penting dalam membentuk masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban. (Indra et al., 2023)

Pergeseran Politik dan Kontribusi Bersama

Setelah Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya aktif dalam bidang pendidikan dan keagamaan, tetapi juga terlibat langsung dalam dunia politik. NU sempat menjadi partai politik tersendiri pada tahun 1952 setelah keluar dari Masyumi, dan ikut serta dalam berbagai pemilihan umum pada masa awal kemerdekaan. Melalui jalur politik, NU berusaha memperjuangkan aspirasi umat Islam di dalam pemerintahan dan lembaga negara. Namun seiring waktu, para ulama NU menyadari bahwa perjuangan keumatan bisa lebih optimal dilakukan melalui jalur sosial-keagamaan daripada politik praktis. Pada tahun 1984, NU secara resmi kembali ke "Khittah 1926", yaitu kembali ke posisi awalnya sebagai organisasi sosial-keagamaan dan tidak lagi terlibat langsung dalam partai politik. Meskipun demikian, peran NU dalam kehidupan berbangsa tetap kuat. NU secara aktif memberikan sumbangan pemikiran dan moral terhadap isu-isu kebangsaan, seperti pendidikan karakter, penanggulangan radikalisme, dan penguatan nilai toleransi antarumat beragama. Konsep Islam Nusantara yang digagas NU menjadi landasan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai, kontekstual, dan sesuai dengan budaya lokal Indonesia. (Indra et al., 2023) Bersama Muhammadiyah, NU menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, religius, dan toleran. Kedua organisasi besar ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Muhammadiyah dengan semangat modernisasi dan rasionalitasnya, sementara NU dengan kekuatan tradisi dan akar budaya lokalnya. Sinergi keduanya menjadikan Islam Indonesia dikenal dunia sebagai Islam yang ramah, bukan marah; Islam yang membangun, bukan memecah. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah dua sayap yang mengangkat tinggi wajah Islam Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. (Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, 2024)

KESIMPULAN

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berasal dari tradisi pesantren, namun berkembang dengan arah dan metode yang berbeda. Muhammadiyah menampilkan diri sebagai gerakan reformasi (tajdid) yang menekankan pentingnya nalar, kemajuan, dan sistem dakwah yang terorganisir. Fokus utamanya berada pada sektor pendidikan, pelayanan masyarakat, serta penguatan ekonomi umat melalui jaringan amal usaha yang berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat muslim secara mandiri dan berkemajuan. Di sisi lain, NU berperan dalam menjaga serta memperkuat warisan keislaman lokal yang berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus memposisikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pelestarian budaya. Melalui pendekatan moderat yang berlandaskan pada nilai-nilai sufistik dan kebijaksanaan tradisi, NU tampil sebagai kekuatan moral dan sosial yang menjaga keseimbangan antara nilai agama dan kebudayaan di tengah kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki peran signifikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pembangunan nasional, dunia pendidikan, hingga penguatan masyarakat sipil. Walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, Muhammadiyah dan NU saling melengkapi dalam membangun wajah Islam moderat di Indonesia. Kolaborasi keduanya menciptakan citra Islam yang terbuka, toleran, dan mampu merespons tantangan zaman baik di tingkat nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju. (2024). Sejarah dan Peran Muhammadiyah untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 124–134. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>
- Indra, A. I., Kurniati, & Abd Rahman R. (2023). Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.207>
- Mursyid, F. K. (2023). The History of Muhammadiyah. *Journal of Indonesian History*, 11(1), 27–32. <https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.63236>
- Siri, H. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. In *Lakeisha*. [http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia %28edit danar%29 Rev 2.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/Sejarah%20Pergerakan%20Nasional%20Indonesia%28edit%20danar%29%20Rev%202.pdf)
- Weli Tridayatna AS, Fathiyah Shabrina Mudafri, I. S. K. (2024). Sejarah dan peran muhammadiyah di dalam pendidikan. *Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, 5(1), 1323–1329.